

**PENUTUPAN KAWASAN INDUSTRI
KERJASAMA KAESONG OLEH KOREA UTARA
(KURUN WAKTU 2004 – 2016)**

ANDIRA VERGIANO MANFALUTHY
Jurusan Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
vergiano@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa Korea Utara sebagai pemimpin mereka, Kim Jong Un. Pilih untuk menutup proyek bilateral ekonomi dengan Korea Selatan hingga dua kali pada periode 2004 -2016. Proyek ini bernama Kawasan Industri Kaesong. Meskipun proyek memberikan banyak keberuntungan dalam ekonomi Korea Utara dan memiliki dampak yang sangat positif, Kim Jong Un sebagai pemimpin mereka tampak seperti tidak terganggu. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari buku, situs web, dan sumber lainnya. Dan teknik analisis penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Kata kunci: Korea Utara, Korea Selatan, Kaesong

Abstract:

This research aims to explain about why North Korea as in their leader, Kim Jong Un. Choose to closing the economy bilateral project with South Korea until two times on period 2004 -2016. This project named Kaesong Industrial Area. Despite the project giving so much fortune in North Korea economy and have a much positive impact, Kim Jong Un as their leader seems like unbothered. The data in this research is secondary data from books, website, and other sources. And the technique of analysis of this research is qualitative analysis techniques.

Keywords: North Korea, South Korea, Kaesong

PENDAHULUAN

Membahas mengenai kedua negara yang berbatasan dengan semenanjung Korea ini memang tidak jauh dari ketegangan politik. Sejarah yang selalu penuh dengan konflik dimulai pasca Perang Dunia ke 2. Korea dibagi menjadi wilayah kekuasaan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dalam perkembangannya Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi oleh PBB dan diselenggarakan di Korea Selatan pada tahun 1948. Reaksi atas penolakan Korea Utara tersebut mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zona demiliterisasi. Zona Demiliterisasi sendiri merupakan sebuah jalur tanah yang melintasi Semenanjung Korea yang berguna sebagai zona penyangga antara Utara dan Selatan Korea. Berada di sepuluh kilometer di sebelah utara Zona Demiliterisasi Korea,

terdapat kawasan yang dianggap menjadi symbol perdamaian bagi kedua Negara yaitu kawasan Industri Kaesong. Kawasan Industri Kaesong atau Kaesong Industrial Complex (KIC) merupakan sebuah kawasan industri yang mulai dioperasikan sejak Desember 2004 sebagai bagian dari reformasi kebijakan ekonomi Korea Utara oleh Kim Jong-il dan kebijakan "Sunshine Policy". Kawasan administrative industri khusus ini terletak di wilayah Korea Utara dan sebagian besar proyek didanai dari Korea Selatan. Awal mula pembentukan Kaesong bertujuan untuk mengembangkan perekonomian kedua Negara dimana Korea Selatan berperan sebagai Negara yang menyediakan teknologi, bahan serta pabrik yang beroperasi, sedangkan Korea Utara berperan sebagai Negara penyedia tempat beroperasi serta buruh yang akan bekerja di pabrik. Kawasan Industri itu dibangun di

desa Bong-Dong, kota Kaesong Korea Utara. Perusahaan Hyundai Korea Selatan dan Komisi Perdamaian Asia Pasifik Choson Korea Utara pada bulan Agustus tahun 2000, sepakat untuk memulai proyek itu dalam rangka menarik investasi perusahaan swasta Korea Selatan. Pembangunan kawasan industri Kaesong itu dibangun di atas tanah seluas 3.960.000 meter persegi, termasuk bangunan pabrik seluas 2.400.000 meter persegi. Pada bulan Juni tahun 2004, kawasan industri diresmikan dan barang produk pertama dikeluarkan pada bulan Desember tahun 2004. Rencana utama dari kawasan Industri ini, menurut Hyundai Asan sebagai co founder dari proyek, akan mempunyai luas wilayah sekitar 6000 hektar dan terdapat tempat perbelanjaan, tempat wisata, pemukiman serta fasilitas berteknologi tinggi. KIC dipercaya bisa membangun perekonomian kedua negara, adanya KIC sedikit banyak akan

membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Korea Utara, selain itu juga menjadi penghubung kedua Negara sebagai pereda tekanan konflik antara kedua Korea.

Namun selama dalam kurun waktu 2004 sampai 2013 kawasan ini terus mengalami konflik, sudah 2 kali Kaesong ditutup sepihak oleh Korea Utara. Pertama kali ditutup yaitu pada tanggal 9 Maret 2009. Kedua yaitu pada tanggal 8 April 2013, pada hari itu Korea Utara menarik sekitar 50.000 pekerjanya di kawasan industri Kaesong. Pada 5 Mei 2013, penguasa Korea Utara Kim Jong Un memberikan pernyataan terkait Kaesong. Menurut pengamat urusan Korea Selatan, pihaknya tidak dapat mencegah kemungkinan Korea Utara untuk mengambil tindakan ekstrim dalam hubungannya dengan Korea Selatan akibat krisis internal mereka

Kawasan industri Kaesong sering dijadikan sebagai

barometer dinamika hubungan antara pemerintah Seoul dengan pemerintah Pyongyang.. Pada awal Juni 2010, kawasan tersebut juga terancam yang dipicu oleh tenggelamnya kapal angkatan laut Korea Selatan, Cheonan. Setelah dilakukan penyelidikan ditentukan bahwa Cheonan telah ditenggelamkan oleh awak kapal selam Korea Utara, Korea Selatan menyatakan akan memotong semua hubungan antar Korea kecuali kawasan Industri Kaesong karena beberapa pertimbangan .

Adanya konflik hingga melakukan aksi penutupan sepihak tersebut menimbulkan efek yang buruk bagi kedua negara. Kawasan industri yang mulanya digunakan untuk membangun perekonomian kedua negara, membeku untuk sementara hingga sebuah persetujuan kebijakan tercapai. Kerugian yang melanda kedua negara atas penutupan tersebut mempengaruhi pada

perekonomian kedua negara khususnya Korea Utara. Korea Selatan mendapat banyak dukungan dalam hal politik atas berjalannya kawasan Industri Kaesong yang sebagai symbol perdamaian dan simbol kerjasama antar kedua Korea. Ada banyak alasan mengapa Kawasan Industri Kaesong vital bagi Korea Selatan yang pertama, mayoritas masyarakat Korea Selatan melihat kawasan tersebut sebagai potensi dalam reformasi ekonomi untuk Korea utara yang mana diharapkan akan mengurangi tekanan kedua Korea. Kedua, kawasan Industri Kaesong dapat menyediakan gaji pekerja buruh yang rendah. Selain itu adanya akses langsung perusahaan Korea Selatan ke perekonomian Korea Utara juga dapat meningkatkan persaingan ekonomi Korea Selatan. Ketiga, banyak masyarakat Korea Selatan khawatir akan ketergantungan ekonomi Korea Utara kepada China, yang mana sudah sekitar 70% dari total perdagangan Korea Utara.

Keempat, Korea Selatan mengemukakan bahwa kawasan Industri Kaesong secara umum dapat sebagai pengendali dari tindakan Pyongyang terhadap Seoul. Banyak partai di Korea Selatan mengkritisi atas keputusan penutupan kawasan, hal itu justru dapat membuat stabilitas kedua Korea terganggu

Disisi lain, selama dibukanya kawasan Industri Kaesong, Korea Utara telah mendapat banyak dampak positif untuk perekonomiannya, hal tersebut terlihat dari dimana pemerintah Korea utara mengambil porsi signifikan dari pekerja yang digaji sekitar \$75 per bulan. Korea Utara juga mengumpulkan pajak dan pendapatan dari aktivitas produksi industri Kaesong, yang di tahun 2012 menghasilkan \$470 juta, dalam bentuk tekstil, suku cadang otomotif dan kabel untuk peralatan rumah tangga. Operasi Korea Selatan di kawasan industri Kaesong menyumbang sekitar \$90 juta setiap tahun

bagi perekonomian Korea Utara.

Menurut data dari pemerintah Korea Selatan dan Amerika, pemerintah Korea Utara mengumpulkan sekitar \$2 juta per bulannya dari pajak para pekerja buruh Korea Utara. Ditambah dengan uang kontrak sewa tanah yang dibayarkan Hyundai Asan yang mana ketua proyek dari Kaesong, sebesar \$12 juta untuk 50 tahun kontrak. Pada tahun 2004, Hyundai Research Institute memperkirakan bahwa Korea Utara dapat menerima \$ 9,55 miliar keuntungan ekonomi selama sembilan tahun jika Kaesong dikembangkan sepenuhnya dan dioperasikan dengan sukses. Keuntungan tersebut mencakup \$ 4,6 miliar dalam pendapatan mata uang asing dengan \$ 700 juta berasal langsung dari operasi Kaesong, \$ 2,5 miliar dari penjualan bahan baku dan produk industri lainnya dan \$ 1,4 miliar dari pajak perusahaan. Pada tahun 2005 dari data hasil produksi Kaesong,

Korea Utara dapat mengekspor sekitar \$ 1,8 miliar dan hasil impor sekitar \$ 3,6 miliar.

A. WPK (Workers Party Korea) sebagai partai pendukung rezim Kim ikut mempengaruhi keputusan dalam penutupan kawasan industri Kaesong

Mengenai domestik politik Copplin menerangkan bahwa politik dalam negeri suatu negara mempunyai peran dalam suatu penyusunan politik luar negeri. Peran tersebut dijelaskan lebih lanjut yaitu adanya ruang interaksi yang saling mempengaruhi antara aktor politik domestik dengan aktor pengambil kebijakan keputusan politik luar negeri. Peran politik dalam negeri terhadap kebijakan politik luar negeri suatu negara sebagaimana dijelaskan dalam Teori William D. Coplin, dipengaruhi oleh aktor-aktor politik dalam negeri yang disebut dengan policy

influencers. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pertama, terdapat empat tipe policy influencers dalam politik dalam negeri suatu negara kaitannya dengan penyusunan politik luar negeri yaitu, (1) birokratis, (2) kepentingan, (3) Partai, dan (4) Massa yang mempengaruhi.

Setiap policy influencers memiliki kontribusi masing-masing dalam penyusunan politik luar negeri suatu negara. Selain itu, setiap negara memiliki karakter yang berbeda sehingga tidak jarang terdapat tipe dominasi influencer yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung dari sistem politik dalam negeri negara tersebut.

Dalam konteks politik dalam negeri Korea Utara, disini terlihat bahwa ada satu aktor politik policy influencer dominan yang menjadi pertimbangan decision maker yang mana disini adalah rezim Kim yaitu Workers' Party of Korea (WPK). Tipe policy influencer ini merupakan

Partisan Influencer, dijelaskan oleh Copplin tipe ini merupakan tipe dari aktor politik dalam negeri suatu negara dimana terdapat keberadaan suatu partai politik yang dapat mempengaruhi penyusunan suatu politik luar negeri di negaranya. Dalam sistem politik dengan partai tunggal maka peran partisan influencer atau partai yang mempengaruhi mempunyai peran dan kendali yang kuat dalam penyusunan politik luar negeri.

Menurut buku yang dikeluarkan Kementerian Unifikasi Korea yang berjudul *Understanding North Korea*, Korea Utara diklasifikasikan sebagai Negara yang menganut sistem politik rezim totalitarian. Sistem politik rezim totalitarian ini mempunyai seorang pemimpin (Supreme Leader) atau Suryong (pemimpin sebagai pusat) yang berkuasa terhadap partai dan juga negaranya. Dalam definisi politik, rezim disini mengacu pada keseluruhan institusi dan

organisasi politik yang membentuk kehidupan bermasyarakat dimana otoritas politik mempertahankan kestabilan pemerintahan berdasarkan ketaatan masyarakatnya. Lebih jelasnya, rezim politik Korea Utara bisa didefinisikan sebagai kombinasi dari satu partai yang berkuasa, yang mana itu hal yang lumrah di Negara sosialis dan satu orang yang berkuasa dengan dicirikan dengan kediktatoran pemimpin tertinggi partai yang tak tertandingi, atau Suryong.

Lalu untuk struktur power rezim, peran Suryong yang merupakan seorang pemimpin, mempunyai kekuasaan absolut kepada partai, pemerintahan dan militer. Ini karena Suryong mempunyai struktur kekuasaan yang tertinggi yang berarti mempunyai power melebihi dari seorang pemimpin militer atau pemimpin partai yang mana disini adalah WPK. Karakteristik politik ini sudah berlangsung secara terus-menerus sepanjang sejarah Korea Utara dan

partai selalu tunduk pada sistem yaitu satu ideologi dan satu orang penguasa untuk mendukung rezim. Dengan ini bisa disimpulkan Korea Utara lebih tepatnya merupakan Negara yang diperintah oleh seorang supreme leader dari partai atau Suryong centered dictatorship bukan sebuah Negara yang diperintah oleh satu partai atau dikuasai oleh kediktatoran parta tertentu.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Korea Utara mempunyai policy influencer berupa partisan influencer yaitu The Workers' Party of Korea (WPK). WPK merupakan partai politik pertama, partai politik penguasa dan partai politik terbesar di Korea Utara. Partai tersebut didirikan pada tahun 1949 yang merupakan penggabungan dari the Workers' Party of North Korea dan the Workers' Party of South Korea.

Peran WPK disini cukup signifikan dalam melegitimasi rezim

penguasa. Sebagai contoh pada bulan Oktober tahun 1980 diadakan kongress WPK ke enam yang mana disitu meresmikan Kim Jong il sebagai penerus dari ayahnya Kim il Sung. Peresmian ini tidak hanya untuk memperkuat posisi Kim Jong il sebagai penerus rezim namun juga sebagai formalisasi tradisi negara Setelah sepeninggal Kim Jong il yang tiba-tiba, WPK mendeklarasikan Kim Jong Un yang merupakan anak dari Kim Jong il sebagai “great successor to the cause of juche” pada 19 Desember, 201. Kemudian bulan April 2012 pada koferensi partai WPK meresmikan Kim Jong Un sebagai penerus dari rezim Kim. Pada konferensi partai ini WPK juga mendeklarasikan Kim Jong il sebagai Eternal General Secretary dari menyusul Kim il Sung sebagai Eternal President of the country yang sudah diresmikan sebelumnya . Proses deklarasi dan peresmian oleh WPK ini menunjukkan bahwa peran partai disini cukup signifikan untuk

mendukung rezim yang memerintah dengan melegitimasi siapa yang akan menjadi penguasa atau penerus rezim.

Untuk memahami pengaruh WPK sebagai policy influencer, sebelumnya akan dijelaskan bagaimana Korea Utara dalam proses mengambil keputusan. Menurut Coplin, dalam sistem politik dengan partai tunggal peran partisan influencer atau partai yang mempengaruhi mempunyai peran yang signifikan dan kontrol yang kuat dalam penyusunan politik luar negeri. Dalam kaitannya untuk membuat keputusan, Korea Utara tidak jauh berbeda dengan sistem yang berada di China atau Negara sosialis lainnya. Di Korea Utara, segala isu penting dari hubungan internasional dibuat dan diputuskan pada level kepemimpinan tertinggi di kongress Workers Party Korean (WPK), rapat pleno WPK Central Committee, dan rapat pertemuan pada WPK Central Committee Politburo and Secretariat .

Seperti yang tadi sudah dibahas bahwa Korea Utara merupakan Negara yang diperintah oleh seorang supreme leader dari partai yang merupakan juga pemimpin partai, maka dalam memutuskan kebijakan luar negerinya Kim Jong il dan Kim Jong Un membutuhkan pertimbangan partai pada saat pertemuan partai WPK. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan sekretaris senior komite sentral WPK, Kim Yang-gon, yang dikutip Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) bahwa Pyongyang untuk sementara juga akan menghentikan operasi di kawasan Kaesong dan sedang dikaji lebih lanjut. Lebih lanjut pada tanggal 8 April 2013, Kim Yang Gon menyatakan bahwa ada dua langkah penting yang akan Korea Utara lakukan, pertama yaitu Korea Utara akan menarik seluruh pekerjaanya dan kedua yaitu akan menimbang eksistensi kawasan industry Kaesong apakah akan ditutup sementara atau selamanya

Selain itu, sikap pesimisme dari partai WPK sudah terlihat yang mana dinyatakan pada saat perencanaan pembangunan Kaesong bahwa partai akan selalu siap untuk menutup kawasan industry Kaesong, menyusul pernyataan dari Kim Jong il selaku ketua partai pada rapat WPK dimana sering mengingatkan kepada kadernya untuk tidak banyak berharap pada Kaesong karena itu merupakan tidak hanya sebatas kerjasama ekonomi tetapi digunakan oleh Korea Selatan sebagai alat propaganda . Jika kita hubungkan dengan isu penutupan kawasan industry Kaesong yang mana itu merupakan isu hubungan antara kedua korea maka bisa kita tarik kesimpulan WPK mempunyai andil dalam memutuskan kebijakan tersebut. Berarti dalam isu ini bisa dikatakan bahwa disini penutupan kawasan industry yang pertama pada tahun 2009 yang mana Kim Jong il yang pada saat itu berkuasa dan penutupan industri yang kedua pada

tahun 2013 yang mana Kim Jong Un sudah menggantikan ayahnya WPK merupakan policy influencer dalam kebijakan tersebut

B. Pengaruh kuat China dalam kondisi ekonomi membuat Korea Utara tidak bergantung pada Kaesong dan kuatnya militer Korea Utara

Menurut Copplin, pengambil keputusan atau policy maker harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer dalam membuat kebijakan luar negeri mereka. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya dalam menyusun politik luar negeri. Policy maker harus mengukur akan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer

Dalam memahami bagaimana Korea Utara mengambil keputusan tersebut maka kita harus melihat seberapa besar kemampuan ekonomi dan militer Negara pembuat keputusan untuk menerima resiko akan kebijakan yang dibuatnya. Merujuk pada pendapat Copplin, untuk mengukur kekuatan ekonomi sebuah Negara dapat diukur dengan GNP (Gross National Product) indikatornya semakin besar GNP sebuah Negara maka akan semakin makmur. Korea Utara sendiri mempunyai total pendapatan GNP (Gross National Product) Korea Utara pada tahun 2011 sebesar US\$ 29,3 miliar dan mempunyai pertumbuhan hanya 0,8%. Dalam keterbatasan kemampuan ekonomi tersebut, Korea Utara selama ini bergantung pada bantuan luar negeri sejak blok sosialis hancur pada pertengahan tahun 1990-an. Salah satu Negara yang sering memberikan bantuan luar negerinya yaitu China yang mana hampir setengah dari total seluruh

bantuan luar negeri China diberikan kepada Korea Utara. Sebagai contoh, pada tahun 1996, Beijing menyetujui untuk memberikan bantuan tahunan dalam bentuk 1,3 juta ton minyak mentah dan 2,5 juta ton batu bara selama lima tahun .

Membahas mengenai kondisi ekonomi yang dimiliki oleh Korea Utara, disini negara China merupakan salah satu mitra terbesar Korea Utara dalam kerjasama ekonomi. Sebagai Negara yang menganut isolasi dalam perekonomiannya, Korea Utara lebih sering bergantung pada China dalam stabilitas dan perkembangan ekonominya. China merupakan sekutu terdekat yang menyediakan bantuan makanan, bahan bakar, mesin industry, investasi dan bantuan ekonomi lainnya.

Sekitar lebih dari setengah aktivitas perdagangan Korea Utara yaitu dengan China. Volume perdagangan Korea Utara

makin membesar seiring dengan tingkat dependensi Negara tersebut dengan China. Pada tahun 1999, Total perdagangan Korea Utara dengan China mencapai 370 juta US dollar atau sekitar 20,4 persen dari total perdagangan luar negeri Korea Utara yang sebesar 1,81 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2013, total perdagangan Korea Utara dengan China melonjak hingga mencapai 89,1% dari total perdagangan luar negerinya atau setara dengan 8,48 miliar US dollar. Berikut adalah tabel total perdagangan luar negeri Korea Utara dengan China yang dilansir oleh Kementerian Unifikasi Korea Selatan. Dengan adanya data tersebut terlihat bahwa ketergantungan Korea Utara dengan Negara China terbilang cukup besar dalam perekonomian negaranya yaitu pada tahun 2009 sebesar 78,5% sedangkan terhitung pada tahun 2013 mencapai 89,1% dari total perdagangan. Dari kondisi

ekonomi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa persentase ketergantungan Korea Utara akan Korea Selatan disini terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan China, yang mana berarti jika Kawasan Industri Kaesong ditutup maka signifikansi terhadap kondisi ekonomi Korea Utara tidak terlalu besar

Kemudian selanjutnya dalam hal kapabilitas militer. Sesuai dengan dengan teori Copplin mengenai pengambilan keputusan, bahwa faktor kapabilitas militer Negara merupakan salah satu pertimbangan decision maker dalam memutuskan kebijakan internasionalnya. Mengenai konteks kapabilitas militer Korea Utara disini mempunyai kekuatan militer yang cukup besar. Hal ini dikarenakan pemerintah Korea Utara mengeluarkan kurang lebih sekitar seperempat GDP (Gross Domestic Product) negaranya untuk bidang militer. Menurut State Department's World

Military Expenditures and Arms Transfers pada laporannya menyatakan bahwa kira-kira Korea Utara menghabiskan kurang lebih sekitar 4 miliar US dollar tiap tahunnya .

Untuk bidang militer, Copplin berpendapat bahwa ada 3 kriteria utama, yaitu; jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya. Ketiga kriteria tersebut menjadi pembeda antara kekuatan-kekuatan militer suatu negara. Dengan bertumpu pada ketiga kriteria tersebut, decision maker dapat melihat sejauh mana kebijakannya akan efektif . Berikut tabel perbandingan jumlah anggota militer dan perlengkapan yang dimiliki antara Korea Utara dan Korea Selatan. Berdasarkan data tabel diatas, pada Januari 2012 jumlah angkatan militer Korea Utara sekitar 1,19 juta personil yang mana terdiri dari 1,02 juta personil angkatan darat, 60.000 angkatan laut dan 110.000 angkatan udara.

Jika dibandingkan dengan kedua angkatan militer Negara, Korea Utara lebih besar hampir dua kali dari Korea Selatan yang hanya mempunyai total 639.000 personil angkatan militer

Mengenai tingkat pelatihan militer, salah satu ciri khusus dari angkatan militer Korea Utara yaitu fokus dengan spesialisasi khusus dalam mekanisasi senjata, kendaraan lapis baja dan special operation forces. Dengan angkatan militer yang memiliki keahlian mekanisasi dan kendaraan lapis baja, pemerintah Korea Utara yakin bahwa hal tersebut sesuai dengan tipe topography di kawasan semenanjung Korea dan juga mempertimbangkan efisiensi dalam membawa teknologi perang terbaru. Selain itu pemerintah Korea Utara juga mempunyai special operation forces yang berjumlah 200.000, unit ini dilatih khusus untuk berperang dalam segala keadaan dan memiliki kemampuan untuk

mencegah serangan baik dari laut ataupun udara

Kekuatan militer yang dimiliki Korea Utara juga tidak lepas dari teknologi persenjataan nuklir. Pemerintah Pyongyang selama ini fokus membangun kekuatannya melalui persenjataan nuklir yang justru menambah posisi tawar Negara tersebut di dunia internasional. Sesuai pendapat Copplin bahwa militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (bargaining position) dimata negara lain sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan Militer merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Coplin berasumsi bahwa pertimbangan pada aspek kondisi ekonomi dan militer menjadi salah satu faktor pendorong decision maker merumuskan suatu formulasi politik luar negerinya di dunia internasional. Berdasarkan

pertimbangan tersebut maka Kim Jong Un dalam konteks ini berani untuk menutup Kaesong yang mana merupakan hubungan kerjasama satu-satunya yang dimiliki kedua Korea

C. Latihan militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan

Dalam kaitannya dengan konteks internasional, Copplin menjelaskan bahwa situasi politik yang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi bagaimana Negara tersebut berperilaku. Untuk memahami ini jika kita lihat sejarahnya Korea Utara dan Korea Selatan selama ini belum pernah menyatakan adanya perdamaian di kedua Negara sejak dimulainya perang Korea dari tahun 1950. Pada tanggal 27 Juli 1953 Korea Utara beserta wakil United Nations Command (UNC) menandatangani perjanjian Korean Armistice Agreement yang mana merupakan perjanjian aksi gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea

Selatan. Perjanjian tersebut berisi sebuah kesepakatan untuk tidak melakukan agresi militer hingga sebuah kesepakatan untuk berdamai dicapai .

Dengan kata lain, hubungan kedua korea hingga saat ini masih dalam konteks berperang karena belum adanya kesepakatan damai. Fakta akan situasi politik kedua Negara korea yang masih belum berdamai membuat keadaan saling curiga terhadap kebijakan luar negeri satu sama lain. Antara lain yaitu adanya latihan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dilakukan di semenanjung Korea

Hubungan aliansi militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat sudah dimulai sejak dibuatnya perjanjian bilateral Mutual Defense Treaty pada tahun 1953. Perjanjian itu menghasilkan sebuah komitmen hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk membantu satu sama lain jika ada serangan eksternal yang

mengancam kedua Negara tersebut. Perjanjian itu juga memperbolehkan Amerika Serikat untuk membuat markas militer mereka di wilayah Korea Selatan. Hingga saat ini sekitar 28.500 personil tentara Amerika Serikat yang terdiri dari angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat dan special operation forces bermarkas di Korea Selatan

Salah satu wujud kerjasama dari aliansi militer tersebut adalah dengan diadakannya latihan militer Foal Eagle. Latihan militer dengan kode Foal Eagle tersebut merupakan latihan yang berlangsung selama dua bulan dan merupakan latihan militer bilateral terbesar didunia yang diikuti sekitar 10,000 tentara dari Amerika Serikat. Latihan tersebut diadakan sebagai respon simulasi jika terjadi adanya invasi dari Negara luar .

Adanya latihan militer yang dilakukan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat inilah yang membuat pemerintah

Korea Utara menutup kawasan industri Kaesong. Disini maka terlihat pola yang dilakukan pemerintah Korea Utara dalam membuat kebijakannya dimana Kaesong dua kali ditutup pada saat sedang berlangsungnya latihan Foal Eagle.

Dua minggu sebelum pemerintah Korea Utara menutup Kawasan Industri Kaesong yang pertama kali, Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang menjalankan latihan militer Foal Eagle yang mulai berlangsung sejak 28 Februari 2009. Latihan militer ini juga membuat pemerintah Korea utara mempersiapkan militernya dalam keadaan “siap berperang” dan memandang latihan ini sebagai persiapan untuk invasi . Kemudian adanya latihan Foal Eagle pada tanggal 11 Maret 2013 ini juga membuat Kawasan Industri Kaesong ditutup kembali untuk kedua

kalinya pada tanggal 27 Maret 2013 atau dua minggu saat dimulainya latihan militer, hal ini dibenarkan dengan tanggapan pemerintah Korea Utara melalui kantor berita KCNA tiga hari setelah penutupan. Menurut pemerintah Amerika pesawat yang tidak bisa dilacak radar nuklir tersebut diterbangkan bukan untuk provokasi namun sebagai deterrence . Penguasa Korea Utara Kim Jong Un memberikan pernyataan terkait Kaesong bahwa jika Selatan benar-benar khawatir tentang masa depan Kaesong, mereka harus mengambil sikap untuk menghentikan semua tindakan bermusuhan dan provokasi militer Hal ini juga dinyatakan oleh pemerintah Korea Utara pada tahun 2009 dimana menutup kawasan industry Kaesong sebagai protes atas diadakannya latihan militer foal eagle

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saifuddin, (2004)
Metode Penelitian,
Yogyakarta:
Pustaka pelajar
- Bermudez, Joseph S.
(2001). *Shield of the Great
Leader.*

*The Armed Forces
of North Korea.
The Armed Forces
of Asia.* Sydney:
Allen & Unwin
- Bleiker, Roland (2005)
*Divided Korea:
Toward Culture
and
Reconciliation.*
University of
Chicago Press
- Eul-chul Lim, “Legal
Reforms and
Foreign
Investment in the
Inter-Korean
Project: The
Kaesong Industrial
Complex,” *North
Korean Review*,
Spring 2008, pp.
26–39.
- Eul-chul Lim, *Kaesong
Industrial
Complex: History,
Pending Issues,
and Outlook*

(Seoul: Hae nam
Publishing
Company, 2006);
- Holsti, K.J, (1988) *Politik
internasional, jilid 2 :
kerangka

untuk analisis*
Jakarta: Erlangga
- Jack C. Plano & Roy Olton
(1999), *Kamus Hubungan

Internasional*,
terjem. Wawan
Juanda. Jakarta:
Putra A Bardin.
- John W. Cresweel, (1993)
*Research Design:
Qualitative &
Quantitative
Approach.* London:
Sage
- Kim Jin-moo, (2013)
Different Stance

Between North and South Korea on The Kaesong Industrial Complex and Its Future Prospect, Korean Institute for Defense Analyses, Issue 85, Mas'ued. Mochtar, (1990)

Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan metodologi.
Jakarta: LP3S

Nasution, Dahlan, (1991)
Politik Internasional; Konsep dan teori
Jakarta: Erlangga

Soekanto, Soerjono, (1990)
Sosiologi : Suatu Pengantar
Jakarta: Grafindo Persada 2000

Sumanto, (1995)
Metodologi

Penelitian Sosial Dan Pendidikan,
Yogyakarta: Andi Offset

T.May Rudy, (2002) *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin,* Bandung , Refika Aditama

William D Coplin dan Mersedes Marbun (2003). *Pengantar Politik Internasional:Suat u*

Telaah Teoritis. Bandung: Sinar Baru Algesindo edisi ke 2.. 30

Young Whan Kihl (1985). North Korea in 1984: "The Hermit Kingdom" Turns Outward!.Universi ty of California Press